

## ***Collaborative Governance Dalam Preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi***

**Mutya Firdaus\*, M. Rijal Amirulloh, Dian Purwanti**  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia  
\*mutyafirdaus@ummi.ac.id

### ***Abstract***

*Road preservation plays an important role in maintaining transportation connectivity and supporting socioeconomic activities in urban areas. The recurring damage to Merbabu Road in Sukabumi City indicates that infrastructure management requires not only technical interventions but also effective collaborative governance among stakeholders. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the preservation of Merbabu Road using the collaborative governance framework of Ansell and Gash, focusing on stakeholder engagement, shared motivation, and capacity for joint action. A qualitative approach was employed through interviews, observation, and documentation, with informants selected using snowball sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that collaborative governance has been formally established through stakeholder involvement in planning, implementation, and monitoring activities. However, the collaboration has not yet been fully effective due to limited inter-agency coordination, budget constraints, fragmented information systems, delayed responses to community reports, and inadequate technical capacity. These limitations contribute to recurring road damage and hinder the sustainability of road preservation efforts. The study concludes that strengthening coordination, institutional capacity, information integration, and responsiveness to community participation is essential to improve the effectiveness and sustainability of road preservation in Sukabumi City.*

***Keywords: Collaborative Governance; Road Preservation; Stakeholder Engagement; Shared Motivation; Capacity for Joint Action***

### ***Abstrak***

Preservasi jalan memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas transportasi dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kerusakan berulang pada Jalan Merbabu di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur tidak hanya memerlukan penanganan teknis, tetapi juga tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam preservasi Jalan Merbabu menggunakan kerangka Ansell dan Gash yang berfokus pada *stakeholder engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan secara *snowball sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah terbentuk secara formal melalui keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan preservasi jalan. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan efektif karena masih terdapat keterbatasan koordinasi antarinstansi, keterbatasan

anggaran, sistem informasi yang belum terintegrasi, lambatnya respons terhadap laporan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas teknis. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan jalan terus berulang dan menghambat keberlanjutan preservasi jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, integrasi informasi, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan preservasi Jalan Merbabu di Kota Sukabumi.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*; **Pemeliharaan Jalan; Keterlibatan Pemangku Kepentingan; Motivasi Bersama; Kapasitas Untuk Bertindak Bersama**

## Pendahuluan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah karena berperan sebagai sarana utama mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta penghubung antarwilayah. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi transportasi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Sebagai negara yang sebagian besar aktivitas transportasinya bergantung pada moda darat, Indonesia membutuhkan pengelolaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan agar fungsi jalan dapat terus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, preservasi jalan menjadi aspek penting dalam menjaga kondisi dan kinerja infrastruktur jalan agar tetap aman, nyaman, dan berfungsi secara optimal. Di tingkat daerah, permasalahan kerusakan jalan masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak pemerintah daerah, termasuk Kota Sukabumi. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kondisi jalan. Selain faktor beban lalu lintas, kondisi cuaca, kualitas konstruksi, serta efektivitas program pemeliharaan juga memengaruhi tingkat kerusakan jalan.

Kerusakan jalan yang tidak segera ditangani dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, menurunkan keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) secara rutin melaksanakan program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sebagai upaya menjaga kualitas infrastruktur jalan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. Data kerusakan jalan berat di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan memerlukan penanganan yang lebih intensif sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Kerusakan Jalan Berat di Kota Sukabumi

No	Nama Jalan	Panjang Kerusakan Berat (KM)
1	Abdul Azis Kh	0,1
2	Balai Desa	0,3
3	Baladongan II	0,118
4	Begeg	0,037
5	Ciandam II	0,185
6	Ciaul Pasar	0,200
7	Cicadas	0,767
8	Cijambe	0,187
9	Cikujang	0,200
10	Cipanas 1	0,100
11	Cipanengah Girang	0,200
12	Ciparigi	0,300

13	Gunung Karang	0,090
14	Jamud Raya	0,500
15	Kokom Komariah	0,500
16	Krakatau PCP	0,900
17	Merbabu	0,800
18	Nangela	0,100
19	Palasari	0,200
20	Pasar	0,220

Sumber: DPUTR Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel 1, Jalan Merbabu merupakan salah satu ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat tertinggi di Kota Sukabumi, yaitu sepanjang 0,8 km. Meskipun terdapat ruas jalan lain dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi, Jalan Merbabu dipilih sebagai lokus penelitian karena kerusakannya terjadi secara berulang meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan. Selain itu, Jalan Merbabu memiliki fungsi strategis sebagai jalan kota yang menghubungkan kawasan permukiman dengan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan tersebut secara langsung memengaruhi mobilitas warga serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya. Fenomena kerusakan yang berulang pada Jalan Merbabu menunjukkan bahwa permasalahan preservasi jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis semata. Selama ini, upaya penanganan kerusakan jalan umumnya berfokus pada perbaikan fisik infrastruktur melalui rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Namun, fakta bahwa kerusakan kembali terjadi dalam waktu relatif singkat mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas preservasi jalan.

Faktor-faktor tersebut dapat berupa keterbatasan koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya sistem pelaporan kerusakan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam konteks tersebut, preservasi jalan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda. Pengelolaan infrastruktur publik tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pendekatan ini dikenal sebagai *collaborative governance*, yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh satu aktor saja. *Collaborative governance* berkembang sebagai pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan publik melalui keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Bryson et al., (2006) kolaborasi lintas sektor memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, informasi, dan kapasitas kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, *collaborative governance* dipengaruhi oleh kualitas jaringan kerja sama yang terbentuk antaraktor. Klijn & Koppenjan (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kemampuan para aktor dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi yang berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, *collaborative governance* mampu menghasilkan nilai publik yang lebih optimal dibandingkan pendekatan yang bersifat sektoral (Page et al., 2015). Bianchi et al., (2021) menegaskan bahwa implementasi *collaborative governance* yang efektif memerlukan komitmen bersama, mekanisme koordinasi yang jelas, serta dukungan kelembagaan yang memadai. *Collaborative governance* menjadi semakin relevan dalam pengelolaan infrastruktur publik karena mampu mendorong terciptanya koordinasi, transparansi,

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui kolaborasi yang efektif, berbagai sumber daya, informasi, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing aktor dapat diintegrasikan untuk mendukung keberhasilan suatu program.

Dalam preservasi jalan, kolaborasi diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat dan tepat. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah diterapkan pada berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan. Nurhayati & Rahman (2023) menemukan bahwa komunikasi, kepemimpinan, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama keberhasilan kolaborasi.

Setiono & Kustulasari (2025) juga menegaskan pentingnya integrasi sumber daya dan komitmen antaraktor dalam mendukung efektivitas *collaborative governance*. Pada sektor infrastruktur jalan, Junaidi et al., (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemeliharaan jalan. Namun demikian, kajian mengenai *collaborative governance* dalam kegiatan preservasi jalan pada tingkat ruas jalan perkotaan masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji interaksi antarpemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan preservasi jalan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui studi pada preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian mengenai preservasi jalan umumnya lebih banyak menekankan aspek teknis, seperti kualitas konstruksi, metode pemeliharaan, dan kondisi fisik jalan. Sementara itu, kajian yang menyoroti dimensi tata kelola kolaboratif dalam preservasi jalan, khususnya pada kasus kerusakan jalan yang terjadi secara berulang, masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam preservasi jalan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *collaborative governance* dalam bidang infrastruktur publik serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas preservasi jalan secara berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam preservasi Jalan Merbabu di Kota Sukabumi. Penelitian dilaksanakan pada November 2025 hingga Maret 2026 di Jalan Merbabu dan instansi yang terlibat dalam kegiatan preservasi jalan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pihak kontraktor pelaksana, serta masyarakat sekitar Jalan Merbabu. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen perencanaan, penganggaran, laporan pelaksanaan kegiatan, notulen rapat koordinasi, dokumen Musrenbang, data kondisi jalan, dan regulasi terkait preservasi jalan. Informan penelitian berjumlah enam orang yang dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, diawali dari informan kunci yaitu Kepala DPUTR Kota Sukabumi selaku Ketua Satgas Anti Bolong Kota Sukabumi, kemudian berkembang kepada Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPUTR Kota Sukabumi selaku pelaksana program, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kota Sukabumi sebagai pendamping program, perwakilan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPD Kota Sukabumi sebagai pendamping program dalam aspek penganggaran preservasi jalan, kontraktor pelaksana sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta masyarakat Jalan Merbabu sebagai pengguna jalan. Teknik *snowball sampling* dipilih untuk memperoleh informasi secara berantai dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses kolaborasi preservasi jalan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan terhadap kondisi fisik Jalan Merbabu, kegiatan preservasi jalan, proses koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

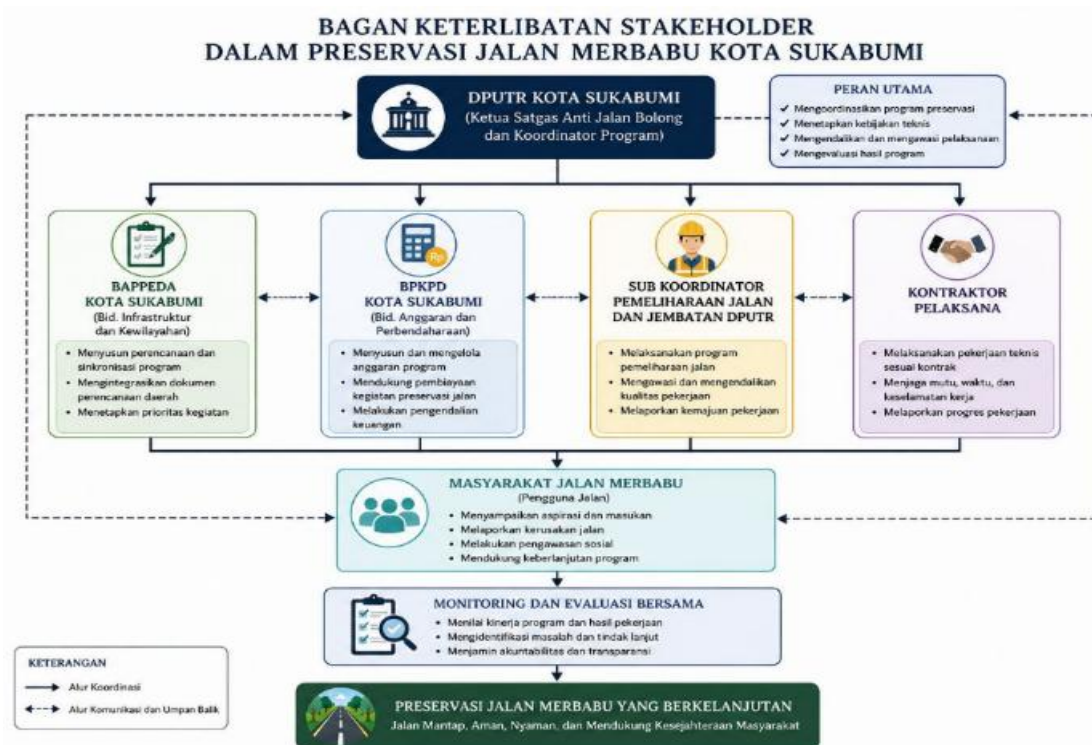
### 1. Stakeholder Engagement Dalam Preservasi Jalan Merbabu

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) dalam preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi melibatkan berbagai aktor yang memiliki tugas, kewenangan, dan kontribusi yang berbeda. Aktor yang terlibat terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, kontraktor pelaksana, dan masyarakat sekitar Jalan Merbabu. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa preservasi jalan tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 2. Pemetaan Aktor Dalam Preservasi Jalan Merbabu

Aktor	Tugas dan Kewenangan	Kontribusi	Batas Peran
DPUTR Kota Sukabumi	Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan preservasi jalan	Menyusun program, melakukan survei kondisi jalan, mengoordinasikan pelaksanaan preservasi	Bergantung pada ketersediaan anggaran
BAPPEDA Kota Sukabumi	Perencanaan pembangunan daerah	Mengintegrasikan kebutuhan preservasi jalan dalam dokumen perencanaan pembangunan	Tidak melaksanakan pekerjaan teknis
BPKPD Kota Sukabumi	Pengelolaan dan penganggaran daerah	Menyediakan dukungan pembiayaan preservasi jalan	Menyesuaikan kemampuan fiskal daerah
Kontraktor Pelaksana	Pelaksanaan pekerjaan fisik	Melaksanakan preservasi jalan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis	Terikat ruang lingkup pekerjaan
Masyarakat	Pengguna dan Pengawas Jalan	Menyampaikan aspirasi dan laporan kerusakan jalan	Terikat ruang lingkup pekerjaan

Sumber: Diolah Peneliti (2026)



Gambar 1. Bagan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi  
(Sumber: Peneliti, 2026)

Gambar 1 menunjukkan hubungan koordinatif antara DPUTR, BAPPEDA, BPKPD, kontraktor, dan masyarakat dalam preservasi Jalan Merbabu. DPUTR berperan sebagai koordinator utama yang menghubungkan seluruh aktor, sedangkan BAPPEDA dan BPKPD mendukung aspek perencanaan dan penganggaran. Kontraktor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik, sementara masyarakat berperan dalam penyampaian aspirasi dan pelaporan kerusakan jalan. Hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2 menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan melalui rapat lintas instansi, forum perencanaan, serta komunikasi informal untuk memastikan pelaksanaan preservasi berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

Salah satu bentuk keterlibatan *stakeholder* diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan terkait kondisi Jalan Merbabu yang memerlukan penanganan.



Gambar 2. Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Gunungpuyuh  
(Sumber: Radar Sukabumi, 2026)

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan Musrenbang sebagai forum partisipatif yang digunakan pemerintah daerah untuk menghimpun usulan pembangunan dari masyarakat. Dalam konteks preservasi Jalan Merbabu, forum ini menjadi media penyampaian aspirasi terkait kondisi jalan yang memerlukan perbaikan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena harus melalui proses verifikasi teknis oleh DPUTR, penyesuaian prioritas pembangunan oleh BAPPEDA, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah oleh BPKPD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat telah terakomodasi secara formal, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan akhir masih dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan teknis dan fiskal. Selain melalui Musrenbang, masyarakat juga menyampaikan laporan kerusakan jalan melalui media sosial dan komunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 6, laporan masyarakat umumnya diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun proses tindak lanjut sering kali memerlukan waktu karena harus melalui verifikasi lapangan dan penentuan prioritas penanganan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholder* tidak hanya sebatas kehadiran dalam forum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses komunikasi dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan.

## 2. *Shared Motivation* Dalam Preservasi Jalan Merbabu

Motivasi bersama (*shared motivation*) tercermin dari adanya komitmen para pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan demi mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kondisi jalan yang aman, nyaman, dan berfungsi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 3, preservasi Jalan Merbabu menjadi salah satu prioritas karena ruas jalan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai akses penghubung kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Komitmen bersama tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam proses preservasi jalan. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan antaraktor belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara dengan Informan 6 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertanyakan efektivitas preservasi jalan karena kerusakan kembali muncul setelah dilakukan perbaikan. Kondisi tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan hasil preservasi yang dilakukan pemerintah.



Gambar 3. Kondisi Jalan Merbabu Sebelum Preservasi Tahun 2025  
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Berdasarkan gambar 3, kondisi Jalan Merbabu sebelum preservasi menunjukkan adanya kerusakan berupa lubang, retak permukaan, dan penurunan kualitas perkerasan pada beberapa titik. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kerusakan tersebut mengganggu mobilitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Temuan ini menjadi dasar perlunya tindakan preservasi melalui koordinasi berbagai pemangku kepentingan



Gambar 4. Kondisi Jalan Merbabu Setelah Preservasi Tahun 2026  
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Berdasarkan gambar 4, kondisi Jalan Merbabu setelah preservasi menunjukkan adanya perbaikan pada sebagian titik kerusakan yang sebelumnya ditemukan pada tahun 2025. Permukaan jalan terlihat lebih rata dan dapat dilalui kendaraan dengan lebih aman. Namun hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan sehingga preservasi jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perbandingan kondisi Jalan Merbabu tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa beberapa titik kerusakan telah diperbaiki, namun masih ditemukan kerusakan berulang pada beberapa segmen jalan. Kerusakan yang ditemukan didominasi oleh retak permukaan dan lubang jalan pada titik yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya preservasi telah dilakukan, keberlanjutan hasil perbaikan masih menghadapi tantangan akibat tingginya beban kendaraan, kondisi drainase, serta keterbatasan penanganan secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya kesamaan tujuan dalam menjaga kualitas infrastruktur Jalan Merbabu telah mendorong terbentuknya komitmen bersama antaraktor yang terlibat. Kondisi ini sejalan dengan Emerson et al., (2012) yang menyatakan bahwa *shared motivation* merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena dapat memperkuat rasa saling percaya, komitmen, dan pemahaman bersama dalam mencapai tujuan kolaborasi.

### **3. Capacity For Joint Action Dalam Preservasi Jalan Merbabu**

*Capacity for Joint Action* merupakan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan sumber daya, kelembagaan, dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPUTR Kota Sukabumi memiliki peran utama dalam pelaksanaan preservasi jalan dengan dukungan BAPPEDA, BPKPD, kontraktor, dan masyarakat. Meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, pelaksanaan preservasi Jalan Merbabu masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 dan Informan 4, salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak seluruh kebutuhan preservasi jalan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Kondisi ini berdampak pada penentuan prioritas penanganan sehingga beberapa pekerjaan harus dilakukan secara bertahap. Selain keterbatasan anggaran, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya teknis dan peralatan yang memengaruhi kecepatan pelaksanaan preservasi jalan. Proses penanganan kerusakan jalan juga harus melalui beberapa tahapan administratif yang menyebabkan respons terhadap kerusakan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.



Gambar 5. Alur Koordinasi Pelaporan Kerusakan Jalan untuk Prioritas DAK Dalam Preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi  
(Sumber: Radar Sukabumi, 2026)

Gambar 5 menunjukkan bahwa proses penanganan kerusakan jalan melibatkan beberapa tahapan administratif dan teknis. Meskipun prosedur tersebut diperlukan untuk menjamin akuntabilitas program, proses yang cukup panjang sering kali menyebabkan masyarakat menilai respons pemerintah terhadap kerusakan jalan masih lambat. Apabila program preservasi memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka proses pelaksanaannya juga harus menyesuaikan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah serta ketentuan pemerintah pusat.

*Capacity for Joint Action* dalam preservasi Jalan Merbabu tercermin dari adanya koordinasi antarinstansi, pembagian peran, serta dukungan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program preservasi. Temuan ini sejalan dengan Klijn & Koppenjan (2016) yang menjelaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* ditentukan oleh kemampuan para aktor dalam mengelola jaringan kerja sama dan mengintegrasikan sumber daya secara efektif. Selain itu, Setiono & Kustulasari (2025) menegaskan bahwa kapasitas kolaboratif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance*

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Preservasi Jalan

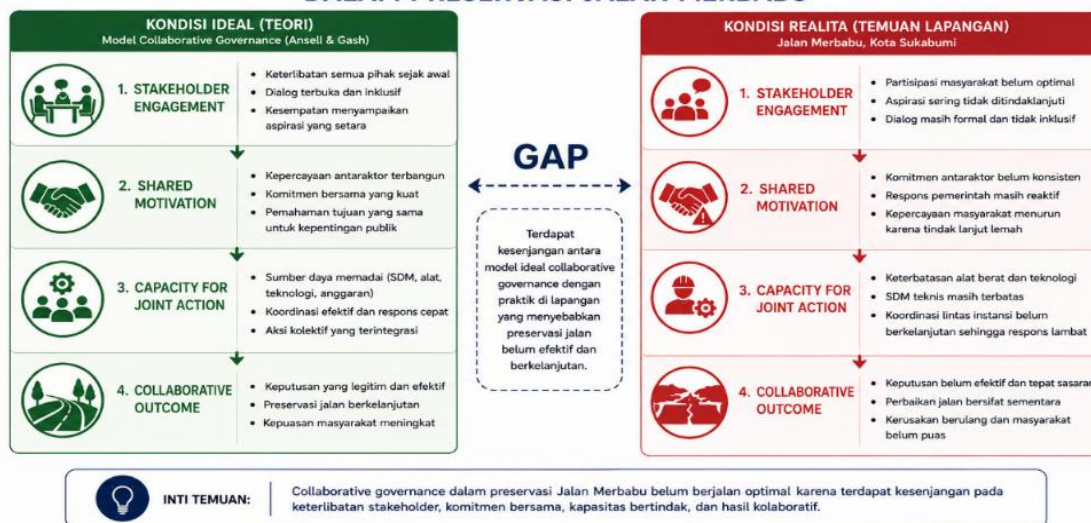
Faktor	Temuan Lapangan	Dampak terhadap Kolaborasi	Rekomendasi
Forum komunikasi	Musrenbang dan rapat koordinasi berjalan rutin	Mempermudah pertukaran informasi	Memperkuat tindak lanjut hasil forum
Komitmen <i>stakeholder</i>	Seluruh aktor terlibat dalam preservasi jalan	Mendukung keberlangsungan kolaborasi	Memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi
Dasar hukum dan kelembagaan	Terdapat pembagian tugas yang jelas	Memberikan kepastian peran	Memperkuat integrasi antarinstansi
Keterbatasan anggaran	Tidak semua kebutuhan preservasi dapat direalisasikan	Membatasi cakupan penanganan jalan	Optimalisasi sumber pendanaan

Proses birokrasi	Penanganan kerusakan melalui beberapa tahapan	Memperlambat respons	Penyederhanaan prosedur
Keterbatasan teknis	SDM dan peralatan belum sepenuhnya memadai	Menurunkan efektivitas preservasi	Penguatan kapasitas tekni
Tindak lanjut aspirasi masyarakat	Tidak seluruh laporan dapat direalisasikan	Memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat	Meningkatkan responsivitas pelayanan

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam preservasi Jalan Merbabu telah terbentuk secara formal melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Namun efektivitas kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan koordinasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas teknis, serta lambatnya tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masih terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi preservasi jalan sehingga kerusakan jalan tetap berulang pada beberapa titik.

### KESENJANGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PRESERVASI JALAN MERBABU



Gambar 6. Analisis Kesenjangan *Collaborative Governance* Dalam Preservasi Jalan Merbabu (Sumber: Peneliti 2026)

Gambar 6 menunjukkan bahwa *stakeholder engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* telah terbentuk dalam preservasi Jalan Merbabu, namun belum mencapai kondisi ideal. Kesenjangan utama terletak pada keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, integrasi informasi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Kesenjangan tersebut menyebabkan tujuan preservasi jalan yang berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah menjadi pendekatan yang digunakan dalam preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi. Akan tetapi, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan *stakeholder*, melainkan juga oleh kemampuan para aktor dalam membangun kepercayaan, mengintegrasikan sumber daya, mempercepat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas teknis, optimalisasi pendanaan, dan peningkatan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas preservasi Jalan Merbabu secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam preservasi Jalan Merbabu Kota Sukabumi telah terbangun melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang tercermin dalam dimensi *stakeholder engagement, shared motivation, dan capacity for joint action*. Keterlibatan DPUTR, BAPPEDA, BPKPD, kontraktor, dan masyarakat telah menciptakan mekanisme kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan preservasi jalan. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi yang ditandai dengan kerusakan jalan yang berulang serta belum tercapainya hasil preservasi yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor saja belum cukup, tetapi perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Secara keseluruhan, efektivitas *collaborative governance* didukung oleh adanya komitmen bersama, forum komunikasi, dan pembagian peran antaraktor yang jelas, tetapi masih dihambat oleh keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang belum maksimal. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori *collaborative governance* Ansell dan Gash dalam menjelaskan pengelolaan infrastruktur jalan di tingkat daerah. Secara praktis, temuan penelitian memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis, serta meningkatkan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat guna mewujudkan preservasi jalan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Adiman, S., Santoso, B., & Wijaya, H. (2023). Preservasi Perkerasan Lentur Jalan Raya: Analisis PCI Dan Strategi Pemeliharaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(1), 45-57.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington: Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Asnery, R., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Efektivitas Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(2), 100-115.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, And Challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581-1589.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design And Implementation Of Cross-Sector Collaborations: Propositions From The Literature. *Public Administration Review*, 66(S1), 44-55.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Didi, L., Tenri, A., & Mustamar, M. (2025). Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 5274-5290.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Gertler, P., Gonzalez-Navarro, M., Gračner, T., & Rothenberg, A. (2024). Road Maintenance And Local Economic Development: Evidence From Indonesia's Highways. *Journal of Urban Economics*, 143, 103411.
- Imperial, M. T. (2005). Using Collaboration As A Governance Strategy: Lessons From Six Watershed Management Programs. *Administration & Society*, 37(3), 281-320.

- Junaidi, J., Sukristyanto, A., & Maduwinarti, A. (2025). Collaborative Governance In Road Infrastructure Maintenance In Berau Regency. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 4(2), 771-790.
- Kiranasari, R. W., Soemitro, R. A. A., Suprayitno, H., & Budianto, H. (2020). Penentuan Faktor Bagi Analisis Faktor Keberhasilan Proyek Preservasi Jalan Skema Long Segment. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(2), 77-90.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks In The Public Sector. *Public Administration*, 94(3), 627-642
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 1-22.
- Page, S. B., Stone, M. M., Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2015). Public Value Creation By Cross-Sector Collaborations: A Framework And Challenges Of Assessment. *Public Administration Review*, 93(3), 715-732.
- Putra, A., Santoso, D., & Hidayat, F. (2022). Preventive Maintenance For Road Sustainability In Urban Areas. *Jurnal Infrastruktur dan Transportasi*, 10(3), 101-114.
- Setiono, D. P., & Kustulasari, A. (2025). Making Collaboration Work: A Systematic Multidimensional Review of Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 15(2), 270-285.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulibarri, N., Imperial, M. T., Siddiki, S., & Henderson, H. (2023). Drivers And Dynamics Of Collaborative Governance In Environmental Management. *Environmental Management*, 71(3), 495-504.
- Wardhani, R., Ngadimo, N., & Muhtadi, A. (2025). Road Preservation Strategies For Urban Infrastructure Sustainability. *Aston Journal of Development Research*, 3(2), 23-34.